

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agussalim Andi Gadjong, *“Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum”*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Akmal Boedianto, *“Hukum Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda APBD Partisipatif”*, Ctk. Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Alwi Wahyudi, *“Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi”*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Bachrul Amiq, *“Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah”*, Ctk. Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Dadang Suwanda dan Akmal malik Piliang *“Penguatan Penguawasan DPRD Untuk Pemerintah Daerah Yang Efektif”* Ctk. Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *“Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*, Ctk. Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Didik Sukriono, *“Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi”*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013.
- Hendra Karianga, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”*, Ctk. Pertama, PT. ALUMNI, Bandung, 2011.
- Hendra Karianga, *“Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia group, Jakarta, 2013.
- Ibnu Syamsi, *“Dasar-Dasar Hukum Kebijakan Keuangan Negara”* Ctk. Ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Jimly Asshididdiqie, *“Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia”*, Ctk. Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Juanda, *“Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah”*, Ctk. Pertama, PT. ALUMNI, Bandung, 2000.
- Lukman Santoso Az, *“Hukum Pemerintahan Daerah Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia”*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mexasai Indra, *“Dinamika hukum Tata Negara Indonesia”* Ctk. Pertama, Reflika Aditama, Bandung, 2011.
- Muntoha, *“Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”*, Ctk. Pertama, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.
- Murtir Jeddawi, *“Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah”*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2008.

- Murtir Jeddawi, *“Negara Hukum Good Governance, Korupsi di Daerah”*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly, *“Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”*, Ctk. Pertama, UI Press, Jakarta, 1989.
- Ni’Matul Huda, *“Hukum Pemerintahan Daerah”*, Ctk. Pertama, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Ni’Matul Huda, *“Problematika Pembatalan Peraturan Daerah”*, Ctk. Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010.
- Ni’matul Huda, *“Ilmu Negara”*, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Nukthoh Arfawi Kurde, *“Telaah Kritis Teori Negara Hukum Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945”*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ridwan, *“Hukum Administrasi Di Daerah”*, Ctk. Pertama, FH UII PERS, Yogyakarta, 2009.
- Roristua Pandiangan, *“Hukum Pajak”*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- S.F Marbun, *“Hukum Administrasi Negara I”*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Sirojul Munir, *“Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya”*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Siswanto Sunarno, *“Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syaukani, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *“Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan”*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Sudono Syueb, *“Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah”* Ctk. Pertama, Laksbang Mediatamma, Yogyakarta, 2008.
- Vieta Imelda Cornelis, *“Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa”*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang laporan penyelenggaraan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

DATA ELEKTRONIK

- <https://purworejokab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/30> diakses tanggal 02 November 2016 pada pukul 15.44 WIB.
- <http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 12.22 WIB.
- www.purworejokab.go.id/profil-daerah/demografi diakses tanggal 20 februari 2017 pada pukul 05.06 WIB.